

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto, Seno, 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: CV Diadit Media.
- Ali, Mahrus, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Arsyad, Jawade, Hafidz, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Jakarta: SinarGrafika.
- Harahap, M, Yahya, 1988, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 1986, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: PT Gramedia
- Hamzah, Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Iskandar, Mia, Amiati, 2013, *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCAC 2000 dan UNCAC 2003*, Jakarta Selatan: REFERENSI (GP Press Group).
- Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.
- Marpaung, Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter, Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhsin Amir, Prakoso Djoko, Riyadi Bambang, 1987, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Melton Putra.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: Alumni.

Prakoso, Djoko, 1987, *Segi-segi Kepidanaan Dalam Kepegawaian Indonesia*, Jakarta: Sungguh Jaya Bersaudara

Situmorang, M, Victor, 1994, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: PT rinekacipta.

S, M, Reza. Zaki/LL.B, Dkk, 2012, *Negeri Melawan Korupsi*, Yogyakarta: Bulaksumur Empat.

Wiyono, R, 2009, *Pembahasan Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, cetakan kesatu*, Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan dan penambahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.